

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada masa mendatang, dari waktu ke waktu masyarakat akan mengalami perubahan akibat kemajuan dalam proses pembangunan yang telah capai. Dengan adanya perbedaan sumber daya alam serta kondisi demografis maka ada terjadi perbedaan dalam pembangunan wilayah sehingga berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat (Ravi et al., 2023). Tujuan pembangunan merupakan suatu bentuk usaha terencana dalam peningkatan kehidupan kesejahteraan manusia yang merata. Pada dasarnya seseorang akan merasa kurang kesejahteraan maka ia sedang dalam kemiskinan sebaliknya apabila kondisi dalam kesejahteraan maka akan diliputi kemakmuran serta kepuasan.

Kemiskinan merupakan kondisi rendahnya pendapatan atau tidak sanggup memenuhi kebutuhan dasar manusia baik dari pangan, papan dan sandang. Badan Pusat Statistik mendefinisikan kemiskinan merupakan individu tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar dalam mencukupi kehidupan (Nurhasanah et al., 2019). Kemiskinan menjadi masalah yang rumit diselesaikan bagi negara berkembang, meskipun beberapa negara berkembang telah menghasilkan pengembangan produksi serta pendapatan nasional (Sartika et al., 2016). Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan pembangunan manusia dengan upaya melalui adanya program *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Program ini memiliki tujuan dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat dimulai pada tahun 2015 hingga tercapainya 17 tujuan yang akan tercapai masa akan datang di tahun 2023 (Sarvianto, 2020). Sesuai dengan

tinjauan *No Poverty* atau Tanpa Kemiskinan, dengan adanya SDGs yang mampu mengakhirinya melalui segala pembangunan. Secara realitas, Indonesia saat ini masih memperjuangkan dalam pengentasan kemiskinan serta pemerintah memiliki perhatian akan program-program pembangunan agar terciptanya keadilan, kesetaraan dan kesejahteraan masyarakat (Devanantyo, 2021).

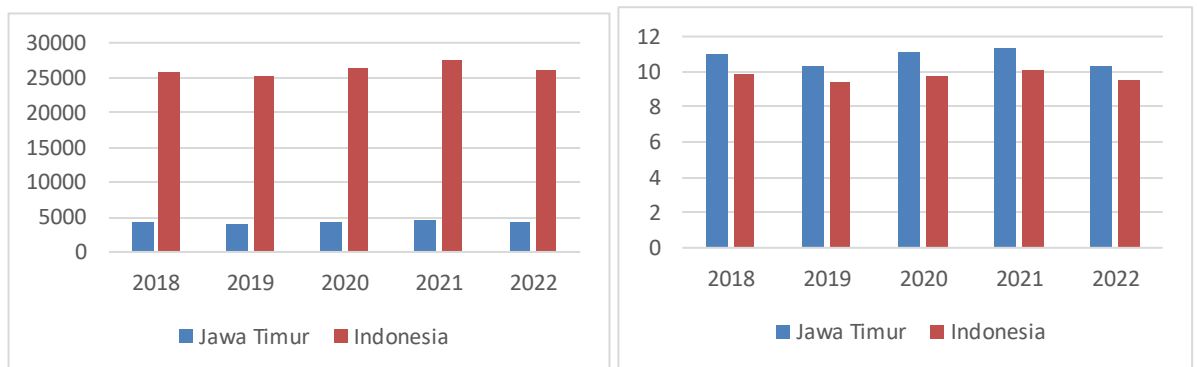
Kemiskinan di Indonesia menjadi permasalahan yang sulit dan masih berusaha dalam pengentasan kemiskinan yang perlu diselesaikan oleh pemerintah. Pada masa pandemi covid-19 masyarakat mengalami masa-masa sulit bahkan berdampak pada sektor kesehatan, sektor ekonomi, sektor ketenagakerjaan dan lainnya. Kemiskinan ditandai dengan banyaknya pengangguran hingga tercapai angka tinggi dan tertinggal dalam kesejahteraan hidup yang berkualitas. Hal ini sangat menghalangi keberhasilan kesejahteraan masyarakat karena terhambatnya pendapatan perekonomian masyarakat.

Kemiskinan memiliki permasalahan secara ruang lingkup luas dapat terjadi akibat pengaruh faktor seperti bencana alam disuatu wilayah dan sosial demografi. Permasalah pada kemiskinan di Jawa Timur menjadi masalah krusial khususnya beberapa daerah kantong kemiskinan (Astutik, 2021). Kantong kemiskinan diartikan adanya beberapa daerah relatif tidak berubah dalam kurun waktu. Masyarakat miskin seringkali lebih terpapar pada alam bahaya dibandingkan populasi lainnya. Bencana alam merupakan salah satu utama penyebab kemiskinan yang berdampak kepada masyarakat miskin sehingga merasakan kesengsaraan akibat kerusakan dari bencana alam

(Desinta & Sitorus, 2021). Perubahan demografi merupakan pendorong utama kemiskinan global karena ketidakpastian ekonomi dan ketidakstabilan sosial (Thurlow et al., 2019). Sosial demografi memiliki pengaruh yang signifikan peningkatan kemiskinan, akibat angka fertilitas tinggi serta memperlambat tumbuhnya perekonomian (America, n.d.). Fenomena yang sama terjadi di Provinsi Jawa Timur dengan penduduk miskin menduduki peringkat pertama dibanding provinsi lain di Indonesia serta Provinsi Jawa Timur mengalami Kemiskinan karena adanya beberapa faktor yang memberi pengaruh. Berikut kondisi perkembangan kemiskinan di Jawa Timur dan Indonesia :

**Gambar 1.1 Perkembangan Kemiskinan di Jawa Timur dan Indonesia**

**Tahun 2018-2022**



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Berdasarkan gambar 1.1 terdapat dua gambar grafik kiri penduduk miskin dan gambar grafik kanan presentase miskin. Secara penduduk miskin Provinsi Jawa Timur lebih unggul dibandingkan provinsi lain di Indonesia dan perbandingan presentase miskin posisi Provinsi Jawa Timur lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Dapat diketahui dari kedua grafik, tahun 2018 terdapat penduduk miskin Provinsi Jawa Timur sebesar 4,33 juta jiwa atau

10,98% dibandingkan dengan Indonesia sebesar 25,9 juta atau 9,82%. Lalu tahun 2019 penduduk miskin Provinsi Jawa Timur menurun sebesar 4,11 juta jiwa atau 10,37% dibandingkan dengan Indonesia menurun sebesar 25,1 juta atau 9,41%. Tahun 2020 terjadi peningkatan pada penduduk miskin Provinsi Jawa Timur sebesar 4,41 juta jiwa atau 11,09% dibandingkan dengan Indonesia meningkat sebesar 26,4 juta atau 9,78%. Tahun 2021 Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan sebesar 4,57 juta jiwa atau 11,40% dibandingkan dengan Indonesia sebesar 27,5 juta jiwa atau 10,14%. Tahun 2022 Provinsi Jawa Timur penduduk miskin sebesar 4,18 juta jiwa mengalami penurunan atau 10,38% dibandingkan dengan Indonesia sebesar 26,1 juta jiwa atau 9,54%. Maka dapat disimpulkan penduduk miskin dan presentase miskin di Provinsi Jawa Timur tergolong lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Program penanggulangan kemiskinan Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Jawa Timur 2023 masyarakat mengalami penurunan pendapatan dan bertambahnya jumlah PHK maka sangat mengambat pertumbuhan ekonomi.

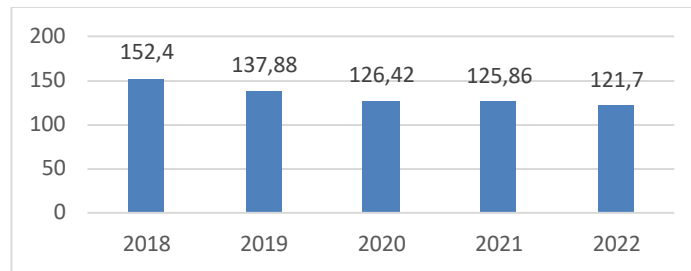
Berdasarkan data *World Risk Index (WRI)*, Indonesia menempati posisi ke-2 dari 190 sebagai negara paling rawan bencana dengan indeks risiko 43,50%. Menurut *United Nations International Strategy for Disaster Reduction*, diantara negara dunia salah satunya Indonesia merupakan negara yang paling rawan terhadap berbagai risiko bencana alam yakni gempa bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, angin puting beliung, kebakaran hutan, letusan gunung berapi serta tsunami. Secara tren tahun ke tahun potensi bencana alam Indonesia terjadi karena perubahan iklim yang sangat drastis dan ekstrim.

Bencana alam akan mengakibatkan kerugian secara sosial dan ekonomi seperti kerugian ekonomi, psikologis manusia dan kerusakan lingkungan.

Bencana akan selalu berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin, karena suatu bencana akan menghancurkan sebagian atau seluruh objek perekonomian rumah tangga yang akan menyebabkan terjebak pada lingkaran kemiskinan dan kesengsaraan (Puja Ilham, 2023). Bencana merupakan pemicu kemiskinan, kerentanan penduduk miskin sulit keluar dari kemiskinan serta risiko bencana dianggap sebagai kebijakan pengentasan kemiskinan (Vogt-Schilb dkk., 2016). Risiko Bencana diartikan kerugian terjadi karena bencana pada suatu wilayah pada jangka waktu tertentu seperti sakit, terluka, kejiwaan terancam, kehilangan harta, kerusakan serta tidak nyaman, mengungsi, kematian bahkan rasa kewaspadaan dan gangguan kegiatan masyarakat (Pendidikan et al., 2017).

Risiko bencana melewati proses kenaikan dan penurunan nilai bencana berdasarkan unsur penyusunan sehingga peran pemerintah diperlukan dalam program upaya mengurangi tingkat risiko bencana. Dalam pengukuran bencana diperlukannya indeks risiko bencana sebagai alat mengukur nilai bencana pada unsur penyusunan terdiri dari unsur bahaya (hazard), unsur kerentanan (vulnerability), serta kemampuan ataupun kapasitas (capacity) pemerintah serta suatu kelompok dalam menghadapi bencana (Putri Pranandari et al., 2022). Terdapat tiga klasifikasi kelas risiko bencana yakni kelas rendah skor <13, kelas sedang skor 13-144 dan kelas tinggi skor >144.

**Gambar 1.2 Risiko Bencana Alam di Provinsi Jawa Timur  
Tahun 2018-2022**



Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana (diolah)

Dari gambar 1.2 menunjukkan bahwa Risiko Bencana Alam di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2018-2022 mengalami penurunan tiap tahunnya. Pada tahun 2018 Provinsi Jawa Timur tercapai risiko bencana sebesar 152,40 persen tergolong tinggi, lalu tahun 2019 mengalami tren penurunan hingga tahun 2022 tercapai sebesar 121,7 persen tergolong sedang. Bencana alam tidak dapat dihindari namun harus tetap adanya upaya agar risiko maupun dampak tidak menyebabkan kerugian korban jiwa, baik yang berupa kerugian materiil maupun non materiil. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai peran pemerintah daerah untuk penanggulangan bencana dalam mencukupi baik dari anggaran, sdm serta sarana-prasarana (Heryati, S., 2020). Provinsi Jawa Timur masih tergolong dalam kategori tinggi dan sedang yang dimana masih adanya kewaspadaan akan bencana alam. Apabila dilihat dengan kantong kemiskinan selama delapan tahun terakhir adanya daerah yang masih tergolong daerah kategori tinggi seperti Kabupaten Sumenep serta Kabupaten Probolinggo. Pada kategori rendah terdapat pada daerah seperti Kabupaten Malang, Kabupaten Jember, Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Tuban, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lamongan dan

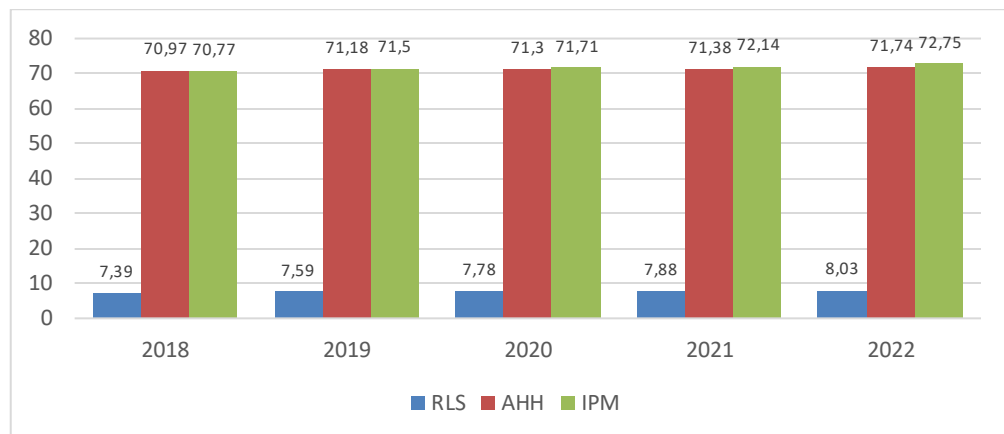
Kabupaten Bojonegoro. Dalam penelitian terdahulu menurut (Rentschler, 2013) menyatakan bahwa bencana berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan yang secara terus menerus meningkat terutama pada kelompok masyarakat termiskin. Semakin risiko bencana dalam kategori tinggi maka akan berpeluang meningkatkan angka kemiskinan dan apabila risiko bencana menurun maka berpeluang menurunkan kemiskinan.

Selain risiko bencana alam, adanya pengaruh lain dari kemiskinan yakni sosial demografi. Sosial selalu berkaitan dengan masyarakat dan demografi berkaitan dengan perubahan penduduk. Sehingga dimaknai dengan persebaran penduduk disuatu wilayah yang berhubungan dengan komponen-komponen perubahan yakni migrasi (perpindahan), fertilitas (kelahiran), serta mortalitas (kematian) (Ekonomi & Soedirman, 2021). Karakteristik demografi berkaitan dengan umur, jenis kelamin, pekerjaan dan pendapatan (Suharto, R. B., & SE, S, 2020). Pada dasarnya pembangunan ekonomi sangat di perlukan bagi kemajuan wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar lebih produktif. Dalam faktor sosial demografi seperti indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, pdrb serta jumlah penduduk yang memiliki pengaruh terhadap kemiskinan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diartikan kunci dasar akan pembangunan daerah (Sayifullah & Gandasari, 2016). Penduduk miskin disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia. Konsep pembangunan mengarahkan untuk peningkatan kualitas penduduk secara fisik, mental dan spiritual. Upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia berguna menghasilkan manusia berkualitas, dengan berbagai kebijakan 3 indikator

seperti pembangunan pendidikan, kesehatan dan pendapatan (Andhykha et al., 2018). Kesehatan sangat diperhatikan agar produktif secara ekonomi, harapan orang sehat hidup lebih lama dan mengembangkan diri dalam finansial untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Dari segi pendapatan terlihat dari pendidikan dan kesehatan, semakin tinggi pendapatan masyarakat akan semakin meningkatkan konsumsi dalam kebutuhan sehari-hari.

**Gambar 1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022**



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

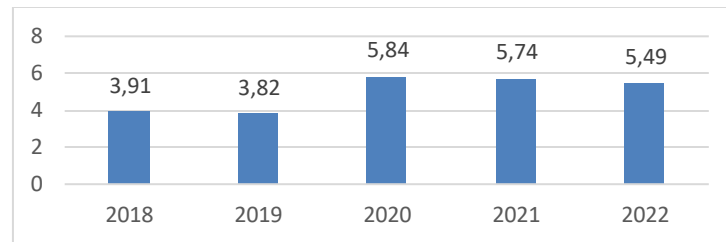
Dari gambar 1.3 tersebut bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Timur secara presentase tahun 2018-2022 mengalami peningkatan tiap tahunnya. Untuk mengukur capaian kualitas pendidikan menggunakan indikator RLS (rata-rata lama sekolah), periode lima tahun terakhir cenderung naik tiap tahunnya tercapai sebesar angka 8,03. Dalam mengukur capaian kualitas kesehatan menggunakan AHH (angka harapan hidup), periode lima tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 71,74%. Dalam periode 2018-2022 angka harapan hidup mencapai rata-rata 70-an tahun yang dimana usia melebihi usia produktif (15-64 tahun) yang dapat



mengakibatkan penurunan produktivitas penduduk sehingga berpengaruh pada kurangnya penghasilan. Secara IPM Provinsi Jawa Timur saat tahun 2018 tercapai 70,77%, lalu naik ditahun 2019 menjadi 71,5%. Tahun 2020 naik sebesar 71,71%, terjadi peningkatan pada tahun 2021 sebesar 72,14%. Pada tahun 2022 lebih meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 72,75%. Kategori IPM Provinsi Jawa timur termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini disimpulkan bahwa pembangunan daerah mendukung akan kualitas hidup manusia meningkat di Provinsi Jawa Timur.

Selain faktor modal manusia ataupun kualitas SDM, adanya faktor lainnya yang memberi pengaruh kemiskinan yakni tingkat pengangguran terbuka (tpt). Pengangguran terbuka diartikan persentase pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Umumnya angkatan kerja dapat diartikan penduduk usia kerja memiliki pekerjaan, belum bekerja, atau sedang mencari kerja. Pengangguran dapat mempengaruhi manusia secara langsung, bahwa kehilangan pekerjaan akan menurunkan standar hidup sehingga menyebabkan tekanan psikologis. Pengangguran mampu mempengaruhi rendahnya produktivitas serta pendapatan masyarakat menurun sehingga dapat menimbulkan permasalahan sosial yang berakibat kemiskinan.

**Gambar 1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Timur  
Tahun 2018-2022**



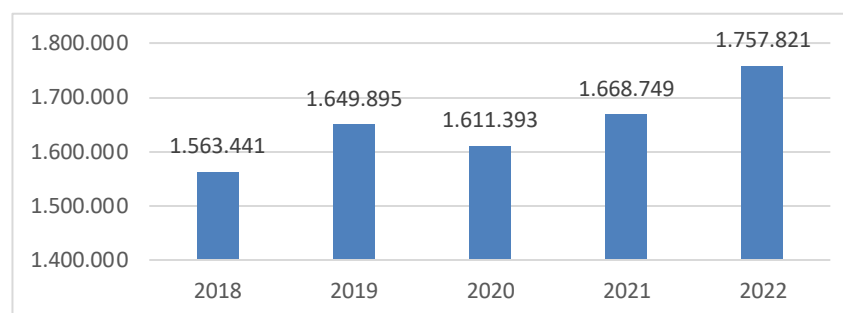
Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Pada gambar 1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur mengalami naik turun setiap tahunnya. Pada tingkat pengangguran terbuka tahun 2018 mencapai sebesar 3,91 persen lalu tahun 2019 turun sebesar 3,82%. Sedangkan tahun 2020 naik lebih banyak sebesar 5,84%, lalu tahun 2021 menurun menjadi 5,74%. Tahun 2022 menurun mencapai sebesar 5,49%. Semakin tinggi tingkat pengangguran, maka dapat menurunkan hasil pembangunan. Pengangguran menjadi indikator untuk menganalisis baik atau tidaknya dari perekonomian suatu negara. Pengangguran dapat mempengaruhi penurunan pendapatan perkapita yang dapat menurunkan daya beli pada masyarakat lalu mempengaruhi penurunan permintaan masyarakat terhadap barang ataupun jasa. Sebaliknya, apabila tingkat pengangguran menurun maka akan mengurangi kemiskinan karena kemampuan masyarakat bekerja dalam memenuhi kebutuhan kehidupan.

Selain tingkat pengangguran terbuka, adanya faktor lain mempengaruhi kemiskinan yakni pertumbuhan ekonomi. PDRB merupakan pengamatan melalui penggunaan sumber daya dari suatu pekerjaan yang akan berpengaruh pada produksi sehingga terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat serta peningkatan tenaga kerja karena aktivitas perekonomian tersebut (Syahputri &

Fisabilillah, 2023). Pertumbuhan ekonomi menumbuhkan penciptaan kesempatan kerja, meningkatnya pendapatan masyarakat dan berkontribusi menurunkan kemiskinan. Pendapatan masyarakat apabila mengalami penurunan maka akan sulit dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Semakin meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto yang meningkatkan suatu wilayah biasanya diiringi tingginya pula kesejahteraan masyarakat (Rahman Suleman et al., 2021).

**Gambar 1.5 Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022**



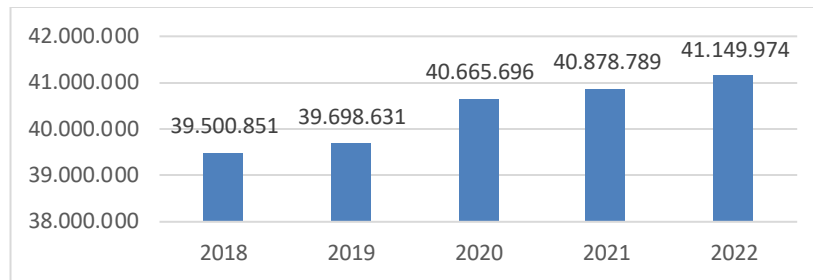
Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Pada gambar 1.5 Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Jawa Timur mengalami aktif berfluktuasi tiap tahun. Pada tahun 2018 mencapai sebesar 1.563.441 Milyar Rupiah, lalu tahun 2019 meningkat menjadi 1.649.895 Milyar Rupiah. Terjadi penurunan tahun 2020 sebesar 1.611.392 Milyar Rupiah, lalu tahun 2021 naik menjadi 1.668.749 Milyar Rupiah. Tahun 2022 mencapai sebesar 1.757.821 Milyar Rupiah. Jika pertumbuhan ekonomi meningkat pada suatu wilayah maka akan besarnya dalam potensi sumber penerimaan suatu wilayah. Namun apabila mengalami pertumbuhan ekonomi menurun maka semakin menunjukkan akan terhambat dalam sebuah kemajuan ekonomi sehingga berpengaruh pada penduduk bertambah karena

terhambatnya suatu kegiatan ekonomi merambat pada pendapatan yang menyebabkan kemiskinan penduduk. Maka dari itu diperlukan dalam melihat pengaruh dari jumlah penduduk.

Selain PDRB, adapun faktor lain yang memberi pengaruh kemiskinan yakni jumlah penduduk. Secara umum penduduk didefinisikan sebagai total manusia yang tinggal di suatu wilayah atau daerah kurun waktu tertentu serta dampak proses demografi yakni perpindahan, kematian dan kelahiran. Pertumbuhan penduduk yang pesat dan tidak terkendali menjadi penyebab pembangunan ekonomi tidak mencapai tujuannya sehingga kesejahteraan rakyat semakin rendah. Apabila jumlah penduduk meningkat akan menambah pada jumlah penduduk miskin. Secara pendapatan, pertumbuhan penduduk yang meningkat terus menerus akan menaikkan banyak dari jumlah angkatan kerja. Sehingga jika terus menambahnya jumlah angkatan kerja tetapi tidaknya ada keseimbangan lapangan pekerjaan yang ada mengakibatkan penambahan jumlah pengangguran sehingga meningkatkan angka kemiskinan (Terhadap et al., 2016).

**Gambar 1.6 Jumlah Penduduk di Provinsi Jawa Timur  
Tahun 2018-2022**



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Pada gambar 1.6 Jumlah Penduduk di Provinsi Jawa Timur masih mengalami peningkatan tiap tahunnya. Jika dilihat tahun 2018 jumlah penduduk sebanyak 39.500.851 jiwa lalu tahun 2019 sebesar 39.698.631 jiwa. Pada tahun 2020 mencapai 40.665.696 jiwa lalu tahun 2021 sebesar 40.878.789 jiwa. Pada tahun 2022 tercapai sebesar 41.149.974 jiwa. Peningkatan terjadi karena bonus demografi semakin banyaknya penduduk usia produktif maka peluang untuk bekerja lebih menghasilkan produktivitas sumber daya manusia lebih unggul. Apabila tidak ada batasan dalam bertumbuhnya penduduk akan mengakibatkan manusia mengalami kesulitan serta kurangnya dalam sumber makanan, hal ini dapat menyebabkan kemiskinan pada manusia. Maka diperlukannya kebijakan seperti program Keluarga Berencana (KB).

Berdasarkan latar belakang diatas, terjadi fenomena kemiskinan Provinsi Jawa Timur menduduki peringkat pertama dibanding dengan provinsi lain di Indonesia. Provinsi Jawa Timur mengalami Kemiskinan karena adanya faktor yang memberi pengaruh. Peneliti menjelaskan dan mencari jawaban mengenai pernyataan dalam kausalitas risiko bencana alam dan sosial demografi untuk kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Maka peneliti tertarik dalam mengkaji

dengan judul penelitian “Pengaruh Risiko Bencana Alam dan Sosial Demografi Terhadap Kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dalam penelitian terdapat permasalahan yang akan diuji dalam penelitian ini didasarkan pada latar belakang dan uraian yang telah dijelaskan diatas :

1. Apakah Risiko Bencana Alam berpengaruh terhadap Kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur ?
2. Apakah Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap Kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur ?
3. Apakah Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh terhadap Kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur ?
4. Apakah Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap Kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur ?
5. Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pengaruh Risiko Bencana Alam terhadap Kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur.

4. Untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur.
5. Untuk menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur.

#### **1.4 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini ialah penelitian kuantitatif menggunakan metode Analisis Regresi Data Panel. Sumber data menggunakan data panel dari Badan Pusat Statistik dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ruang Lingkup yang dipergunakan pada penelitian untuk menjabarkan Pengaruh Risiko Bencana Alam dan Sosial Demografi Terhadap Kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan Risiko Bencana Alam, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, Produk Domestik Regional Bruto dan Jumlah Penduduk yakni variabel bebas/independent serta Kemiskinan sebagai variabel terikat/dependen untuk alat ukur dan metode analisis regresi panel dan mengetahui dampak terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Akademik

Dapat memberikan sebagai referensi memperluas bagi peneliti selanjutnya dalam penggunaan konsep serta dasar penelitian. Bisa memberikan gambaran bagi peneliti mengenai kajian risiko bencana alam atau sosial demografi terhadap kemiskinan.

## 2. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan manfaat bagi pemerintah agar lebih meningkatkan kebijakan dan upaya untuk menekan kemiskinan dari pengaruh risiko bencana alam atau sosial demografi di Provinsi Jawa Timur.

## 3. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan kesadaran dan wawasan bagi masyarakat untuk mengetahui dampak risiko bencana alam dan sosial demografi terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.